

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Jelli Putra, Yetti, and Sandra Dewi. "Penegakan Hukum Terhadap Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 547–66.
- BPOM. "Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi Dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi," 2013.
- BPOM RI. "Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik," 2020.
- Direktorat Standardisasi Obat NPPZA. "Laporan Survei Efektivitas Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Obat Tahun 2021," 2023.
- "Made Pasek Diantha. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group," n.d.
- Nugroho, Leonardo Cahyo. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Farmasi Terhadap Izin Edar Obat." *Jurnal Juristic* 1, no. 02 (2020): 177–96. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i02.1650>.
- Peraturan BPOM. "Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian," 2021.
- Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 Mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Sektor Obat Dan Makanan," n.d.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Nomor 40 Tahun 2013 Mengenai Pedoman Pengelolaan Prekursor.,," n.d.
- Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Obat Obat Tertentu (OOT).," n.d.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Mengenai Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Sektor Kesehatan.,," n.d.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Sektor Kesehatan,” n.d.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Yang Mengatur Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi,” n.d.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Terkait Pedagang Besar Farmasi.,” n.d.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Permenkes Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi.,” n.d.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011 Mengenai Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.,” n.d.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,” n.d.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.,” n.d.
- Permenkes RI. “Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi,” 2023.
- . “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi,” 2011.
- . “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Prekursor,” 2023, 1–3.
- . “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Farmasi,” 2015.
- . “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi,” 2023.
- . “Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar

Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan,” 2021.

- Putri, Hana Fajrin Ananda, Peppy Octaviani, and Galih Samodra. “Evaluasi Pengelolaan Prekursor Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi Dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi Di Apotek Wilayah Kabupaten Banyumas.” *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, no. 44 (2021): 231–37.
- Putri, Melisa Fuji Faujiah Dwi, and Keri Lestari Dandan. “Implementasi Kepatuhan Pelaksanaan Cara Distribusi Obat Yang Baik Terkait Produk Khusus Psikotropika Dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi Di PBF PT ‘X’ Di Kota Tasikmalaya.” *Majalah Farmasetika* 8, no. 3 (2023): 224–34. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v8i3.44089>.
- Putri, Uthia Narida, Yane Dila Keswara, and Riana Widyaningrum. “Evaluasi Pengelolaan Obat Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Di Rumah Sakit X Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Perundangan Yang Berlaku.” *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 9, no. April (2025): 571–80.
- Safitri, Indah Dian, A Hasrawati, and Sitti Amirah. “Profil Pengelolaan Obat Golongan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Di Apotek Rumah Sakit Stella Maris Makassar.” *Makassar Pharmaceutical Science Journal* 1, no. 4 (2024): 358–72.
- Sinuraya, Fransiskus Xaverius Julanta, Mahmud Mulyadi, and Syarifa Lisa Andriati. “Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Perkara Pidana No. 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel.” *Journal of Science and Social Research* VII, no. 4 (2024): 1916–23.
- T, Rahwana, and Reno Renaldy m. Dedi Widodo Welly Sando Dami Yanthi. “Evaluasi Pelaksanaan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) Dari Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Ke UPT Puskesmas Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.” *ORKES: Jurnal Olahraga Dan Kesehatan* 1, no. 3 (2023): 695–710.

Wawancara Dengan Apoteker Penanggung Jawab PT. Pauh Mandiri Sejahtera,”

Wawancara Dengan Komisariat PT. Pauh Mandiri Sejahtera,”

Yovia, Rizki Arrahman, Fauqi Elfarabi, Fuji Handayani, Ari Andriano Santoso, and

Surya Dwi Putra. “Penyimpangan Distribusi Obat Keras Pada Sarana Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian.”

Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety 2, no. 1 (2022): 1–13.

<https://doi.org/10.54384/eruditio.v2i1.74>.